



ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Farhan Fakhriza Tsani¹ Harti Budi Yanti²

^{1,2}. Universitas Trisakti, Jakarta

Email : farhan023002018033@std.trisakti.ac.id

hartibudi@trisakti.ac.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara. Belanja pemerintah sebagian besar dilakukan melalui prosedur yang disebut pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa (procurement) adalah perolehan barang atau jasa yang layak dan diperoleh secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pembeli sesuai spesifikasi yang diinginkan dalam hal kuantitas, kualitas, lokasi dan waktunya . Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Data diambil melalui kuisisioner dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden pada 14 satuan kerja Badan Kepegawaian Negara. Sampel ditentukan melalui purposive sampling dengan kalkulasi jumlah minimum sampel menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: pengadaan barang dan jasa pemerintah; kompetensi; pengendalian intern.

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence that the competence of human resources and internal control affect the quality of government procurement of goods and services at the State Civil Service Agency. Government spending is largely carried out through a procedure called the procurement of goods and services. Procurement of goods and services (procurement) is the acquisition of goods or services that are feasible and obtained efficiently to meet the needs of buyers according to the desired specifications in terms of quantity, quality, location and time. The study was conducted by quantitative methods. The population in this study is all civil servants within the State Civil Service Agency. The data were taken through a questionnaire with a total sample of 100 respondents in 14 work units of the State Civil Service Agency. The sample was determined through purposive sampling by calculating the minimum number of samples using the Slovin formula. The results of this study show that the competence of human resources and internal control have a positive and significant influence on the quality of procurement of goods and services..

Keywords: government procurement of goods and services; competence; internal control.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan utama di dalam pemerintahan. Selain belanja pegawai, pemerintah juga melakukan belanja modal, belanja barang, dan belanja lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional serta memenuhi kewajibannya kepada rakyat. Belanja pemerintah sebagian besar dilakukan melalui prosedur yang disebut pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa (procurement) adalah perolehan barang atau jasa yang layak dan diperoleh secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pembeli sesuai spesifikasi yang diinginkan dalam hal kuantitas, kualitas, lokasi dan waktunya (Van Weele, 2010).

Selain mendukung operasional pemerintahan, kegiatan pengadaan barang dan jasa juga menjadi

stimulus bagi perekonomian sebuah negara. Teori ekonomi makro yang diungkapkan John Maynard Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) memiliki dampak penggandaan (*multiplier effect*) pada perekonomian. (Ramadhani & Sugiyanto, 2014) mendefinisikan dampak penggandaan sebagai dampak perubahan pada pendapatan domestik bruto (PDB) akibat perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Sebagai ilustrasi, pengadaan kertas yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan kemampuan ekonomi pabrik kertas. Peningkatan kemampuan ekonomi pabrik kertas akan menstimulasi peningkatan pada industri kayu sebagai bahan baku kertas. Dalam prosesnya, terdapat ribuan bahkan ratusan ribu individu yang terlibat, di antaranya pegawai pabrik, distributor, pemilik properti, dan lain-lain. Efisiensi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya akan mempengaruhi kualitas pelayanan pemerintah, namun juga pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, kualitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan faktor yang penting bagi kemajuan sebuah negara.

Menjamin kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proses pengadaan yang efisien dan berintegritas akan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang terjadi saat ini masih dinilai belum ideal. Menurut data yang dirilis oleh Indonesia Procurement Watch (IPW), 70% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan PBJ. (narotama, 2013) Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya korupsi, sekaligus menyederhanakan proses birokrasi pengadaan barang dan jasa. Regulasi terkait pengadaan barang dan jasa menjadi penting mengingat anggaran belanja pemerintah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.951,26 triliun rupiah (Bachtiar et al., 2016).

Setiap tahun realisasi belanja pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Hal ini wajar mengingat perekonomian nasional juga terus bertumbuh dan pendapatan negara cenderung meningkat (Kusuma, 2012). Pada tahun 2020 terjadi peningkatan belanja yang tajam yaitu naik sebesar 22,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi di hampir seluruh jenis belanja. Kenaikan yang signifikan terjadi pada belanja barang dan bantuan sosial. Hal ini terjadi akibat kebijakan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19 melalui belanja barang, serta untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan sosial. Di tahun 2021, RAPBN masih merencanakan defisit anggaran sesuai dengan kebijakan pandemi dengan rencana belanja naik dari tahun sebelumnya sebesar 6,5%. Saat penelitian ini ditulis, pemerintah belum merilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2021 (Sudiarianti et al., 2015).

Belanja pemerintah memiliki peran krusial dalam berbagai dimensi. (Khusaini, 2019) mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian negara terdiri dari 3 aspek yaitu:

a. Peran distribusi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang dirumuskannya. Kesejahteraan ini dibangun dengan cara meningkatkan output perekonomian dan melakukan pemerataan kekayaan (Sukmana, 2016). Distribusi kekayaan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pajak dan instrumen lainnya. Dengan adanya peran distribusi ini, kekayaan tidak berputar di sebagian kalangan saja sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat hidup sejahtera.

b. Peran alokasi

Sebuah negara memiliki tanggung jawab memberikan kesejahteraan di seluruh wilayahnya. Adanya kesenjangan perekonomian antar wilayah akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan. Perekonomian Jakarta yang gemerlap jauh lebih hidup daripada perekonomian di wilayah Papua. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sarana dan infrastruktur antar wilayah. Dalam kondisi ini, pemerintah hadir melakukan alokasi dana untuk membangun wilayah lain agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan.

c. Peran stabilisasi

Perekonomian dalam jangka panjang selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan ini seringkali berdampak besar seperti krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi, pemerintah turun tangan melakukan kebijakan stabilisasi. Di antara bentuk stabilisasi adalah dengan meningkatkan tarif pajak saat terjadi economic boom serta meningkatkan pengeluaran (defisit) saat periode resesi atau krisis ekonomi.

Menurut (Agustina, 2014) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sistem pengendalian intern dan kualitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pada prosedur pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kediri. (Astuti, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas SDM (panitia) dan pengendalian intern (lingkungan pengendalian) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa dalam kaitannya dengan mencegah kecurangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Gusnita et al., 2019) menyimpulkan bahwa kualitas SDM (panitia pengadaan) dan lingkungan pengendalian menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas pengadaan barang dan jasa.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara, BKN mempunyai tugas penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara agar tercipta SDM aparatur yang profesional, berkualitas dan bermoral tinggi, untuk mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan tugas yang krusial dan cakupan wilayah kerja yang luas, BKN memiliki tantangan sendiri untuk mengelola pengadaan barang dan jasanya. Mengukur pengaruh kompetensi SDM dan penerapan SPIP terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di BKN akan mampu memberikan arah kepada pemangku kepentingan, khususnya di BKN, dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengadaannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Pangaribuan, 2018). (Pangaribuan, 2018) mengukur kinerja pengadaan dengan variabel independen implementasi *e-procurement* dan kompetensi. Sementara itu, penelitian ini mengukur pengaruh kompetensi SDM dan pengendalian intern terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian (Pangaribuan, 2018) yaitu:

1. Peneliti memperluas responden tidak hanya pegawai dengan jabatan fungsional pengadaan saja, namun juga pegawai yang secara tidak langsung berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa seperti pejabat pembuat komitmen (PPK), staf PPK, auditor, maupun pejabat struktural. Hal ini akan meningkatkan objektivitas hasil kuisioner.
2. Peneliti mengganti variabel implementasi *e-procurement* dengan pengendalian intern. Hal ini karena dalam kondisi terkini implementasi *e-procurement* telah relatif stabil. Di sisi lain, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) belum terlalu familiar di tengah pegawai sehingga dinilai lebih tepat untuk diangkat sebagai variabel penelitian.
3. Responden penelitian ini tersebar secara geografis di berbagai lokasi kantor Badan Kepegawaian Negara mulai dari Aceh hingga Jayapura. Kuisioner online yang disebar memungkinkan cakupan responden yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei melalui kuisioner. Kuisioner disebar kepada unit sampel dalam waktu 3 (tiga) pekan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 21 Juni 2022. Penyebaran kuisioner dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Form. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis dengan metode regresi berganda. Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang bekerja di Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari 1 kantor pusat, 1 pusat pengembangan kepegawaian, dan 14 kantor regional. Berdasarkan data yang didapatkan dari Biro Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Negara, terdapat 2.623 pegawai ASN yang aktif bekerja di BKN. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus minimal Slovin yaitu $n = N / (1 + Ne^2)$ dengan n = jumlah sampel; N = jumlah populasi; dan e = taraf kesalahan. Taraf kesalahan ditentukan sebesar 10%. Dengan taraf kesalahan

tersebut didapatkan jumlah minimal sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{2623}{1 + (2623 * 0,1^2)} = 96,32$$

Dari rumus Slovin didapat jumlah minimal sampel yang harus diambil sebanyak 96 sampel. Untuk menambah reliabilitas, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 orang. Kuisisioner diukur dalam skala Likert (1-5).

Variabel pada penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM dan pengendalian intern. Kompetensi SDM adalah kemampuan manusia dalam organisasi untuk menyelesaikan tugasnya diukur dari empat karakteristik yaitu pengetahuan (*knowlegde*), keterampilan (*skill*), karakteristik pribadi (*trait*), dan motivasi (*motive*) (MacDonald & Spencer, 1993). Pengendalian intern adalah langkah dan tindakan konsisten serta menyeluruh yang diambil oleh pimpinan tinggi maupun pegawai untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, aset milik negara yang terlindungi serta ketaatan pada peraturan yang berlaku. SPIP diukur dengan lima aspek yaitu (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, serta (5) pemantauan pengendalian intern (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Adapun kualitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) didefinisikan sebagaimana tujuan PBJ. Variabel dependen penelitian ini adalah kualitas PBJ. Variabel ini didefinisikan ke dalam empat aspek yang diperoleh dari tujuan PBJ sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Empat aspek kualitas PBJ tersebut adalah kualitas hasil, kuantitas hasil, akuntabilitas dan integritas proses pengadaan.

Variabel tersebut dijabarkan dalam beberapa item konstruk pertanyaan kuisisioner yang dijawab oleh responden. Item-item konstruk tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Item-Item Konstruk Variabel

Kompetensi (X₁) Pengendalian Intern (X₂) dan Kualitas PBJ (Y)	
No.	Pernyataan
X _{1.1}	Latar belakang pendidikan SDM pengadaan telah sesuai dengan pekerjaannya
X _{1.2}	SDM pengadaan telah tersertifikasi dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya
X _{1.3}	SDM pengadaan memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mendukung pelaksanaan tugasnya
X _{1.4}	SDM pengadaan mampu mengoperasikan aplikasi komputer dengan baik
X _{1.5}	SDM pengadaan mampu membuat analisis dan mengambil keputusan sesuai dengan tanggung jawabnya
X _{1.6}	SDM pengadaan memiliki kemampuan komunikasi yang baik kepada atasan, rekan, pihak eksternal dan pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya
X _{1.7}	SDM pengadaan memiliki semangat kerja yang baik
X _{1.8}	SDM pengadaan berkomitmen kuat dalam menyelesaikan target kinerja yang ditetapkan
X _{1.9}	SDM pengadaan senang dan mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya
X _{1.10}	SDM pengadaan semangat dalam mengembangkan diri dengan pelatihan dan sertifikasi
X _{1.11}	SDM pengadaan memegang teguh etika dan integritas dalam melaksanakan tugasnya
X _{2.1}	Penegakan nilai integritas dan etika telah dilakukan di seluruh pegawai pada berbagai hierarki jabatan
X _{2.2}	Struktur organisasi telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan
X _{2.3}	Pendelegasian wewenang dan pemisahan tanggung jawab telah dilakukan dengan tepat
X _{2.4}	Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) atau inspektorat telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif

No.	Pernyataan
X _{2.5}	Identifikasi dan analisis risiko telah dilakukan
X _{2.6}	Pimpinan terlibat aktif dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko
X _{2.7}	Penilaian risiko telah digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
X _{2.8}	Rencana dan capaian kinerja telah direviu dan dievaluasi secara berkala
X _{2.9}	Sistem informasi telah dibangun dengan standar keamanan yang mumpuni dan dievaluasi secara berkala
X _{2.10}	Pemeriksaan atas kondisi fisik aset telah dilakukan secara berkala
X _{2.11}	Informasi terkait keuangan, kinerja dan lain-lain baik berasal dari internal maupun eksternal telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak demi mendukung tujuan organisasi
X _{2.12}	Pimpinan Organisasi telah melakukan komunikasi yang jelas terkait tujuan organisasi sehingga setiap pegawai dapat melakukan tugasnya untuk mewujudkan tujuan tersebut
X _{2.13}	Terdapat sarana yang efektif bagi setiap pemangku kepentingan organisasi untuk memberikan kritik, saran dan pengaduan dengan jaminan keamanan bagi pelapor/pengkritik
X _{2.14}	Komunikasi dan kerja sama dengan mitra kerja eksternal (instansi pemerintah maupun swasta) telah terjalin dengan efektif dan konstruktif
X _{2.15}	Pimpinan organisasi terlibat langsung dalam pemantauan berkelanjutan penerapan pengendalian intern serta mendukung saran perbaikan yang disampaikan oleh setiap pegawai
X _{2.16}	Evaluasi terpisah atas pengendalian intern telah dilakukan oleh SDM yang mumpuni
X _{2.17}	Proses tindak lanjut atas rekomendasi temuan audit internal dan eksternal telah dilakukan secara efektif
Y.1	Produk yang dihasilkan sesuai spesifikasi yang direncanakan;
Y.2	Spesifikasi produk yang direncanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan (pegawai atau masyarakat);
Y.3	Rencana target kuantitas pengadaan telah ditentukan dengan akurat dan penuh pertimbangan;
Y.4	Kuantitas yang direncanakan dapat terealisasi dengan optimal;
Y.5	Proses pengadaan dilaksanakan secara tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
Y.6	Pemilihan tender dan penyedia dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
Y.7	Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan ekonomi UMKM dalam negeri;
Y.8	Proses pengadaan secara elektronik telah dilaksanakan secara optimal sesuai peraturan;
Y.9	Proses pengadaan dilaksanakan secara bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Metode Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan regresi berganda karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari 2 variabel (*multivariate*). Selain itu, perlu mencari tahu seberapa besar pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan model sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : kualitas pengadaan

β_1, β_2 : koefisien regresi

X1 : Kompetensi
X2 : pengendalian intern
e : eror/kesalahan

Metode regresi linear berganda menyaratkan uji asumsi klasik agar data yang diperoleh memenuhi ketentuan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas data. Selain itu dilakukan juga pengujian instrumen yang dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini memakai data primer yang diambil secara langsung melalui kuisioner. Kuisioner disebar secara daring kepada seluruh pegawai BKN yang memiliki jabatan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Data pegawai yang digunakan sebagai acuan adalah data pegawai BKN per bulan April 2022. Tercatat ada 2.623 pegawai yang tersebar di 15 satuan kerja (satker) BKN. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat maupun yang memahami kondisi pengadaan barang/jasa di BKN. Jabatan responden tersebut di antaranya pejabat pembuat komitmen (PPK) dan stafnya, bendahara, pejabat pengadaan, pengelola barang milik negara (BMN), kepala tata usaha, serta auditor (APIP). Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara kompetensi SDM dan pengendalian intern terhadap kualitas PBJ di BKN.

Tabel 3
Rincian Responden Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	Jumlah Responden	Total Pegawai
Kantor Pusat BKN Jakarta	43	1298
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	11	142
Kantor Regional II BKN Surabaya	8	117
Kantor Regional III BKN Bandung	0	121
Kantor Regional IV BKN Makassar	0	120
Kantor Regional V BKN Jakarta	3	82
Kantor Regional VI BKN Medan	2	87
Kantor Regional VII BKN Palembang	5	92
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	8	104
Kantor Regional XI BKN Manado	2	71
Kantor Regional X BKN Denpasar	2	84
Kantor Regional IX BKN Jayapura	3	64
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	3	94
Kantor Regional XIII BKN Aceh	6	55
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2	52
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2	40
TOTAL	100	2623

1. Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang digunakan dalam penelitian. Gambaran data ini ditampilkan untuk melihat sebaran data yang diperoleh apakah bersifat homogen atau cenderung berfluktuasi. Statistik deskriptif data penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Deviation	TCR	Ket.
Kompetensi SDM (X ₁)	100	3,00	5,00	4,12	0,46	82%	Baik
Pengendalian Intern (X ₂)	100	2,82	5,00	3,93	0,51	79%	Cukup
Kualitas PBJ (Y)	100	2,89	5,00	4,11	0,48	82%	Baik

Data yang diuji dalam penelitian ini relatif homogen. Hal ini terjadi karena data yang digunakan adalah jawaban kuisioner dengan skala likert 1-5. Meski demikian terdapat beberapa karakteristik data yang dapat dibandingkan antara tiga variabel yang diukur. Dapat dilihat pada tabel bahwa standar deviasi bervariasi antara 3 variabel. Standar deviasi paling tinggi ada pada variabel X₂ disusul oleh Y dan X₁. Tingginya standar deviasi variabel X₂ dapat disebabkan oleh banyaknya item pertanyaan yang digunakan untuk mengukurnya. Jumlah item pertanyaan untuk variabel X₁, X₂, dan Y secara berurutan adalah 11, 17, dan 9 item.

Selain itu, pengendalian intern merupakan variabel yang relatif sulit diamati oleh pegawai dibandingkan dengan variabel lainnya. Pengetahuan tentang pengendalian intern mungkin hanya dipahami secara mendalam oleh beberapa pihak seperti auditor maupun pegawai yang secara khusus bertugas membangun SPIP. Hal ini mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada persepsi antar pegawai tentang pengendalian intern di lingkungan BKN. Adapun untuk tingkat pencapaian responden (TCR) secara umum dapat dikatakan baik.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan bersifat valid untuk mengukur setiap variabel. Uji validitas dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan melihat nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) dan membandingkan nilai Pearson Correlation (r hitung) dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) sebesar 98 (N-2). Nilai r tabel untuk df sebesar 98 adalah 0,197. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, nilai signifikansi 2-tailed pada seluruh item pertanyaan dari setiap variabel bernilai 0,000. Selain itu, nilai r hitung pada setiap item pertanyaan bernilai lebih dari 0,197. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid untuk mengukur setiap variabel yang akan diuji.

Selain uji validitas, data penelitian kuisioner juga harus melalui tahap uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur keandalan sebuah kuisioner dengan melihat konsistensi jawaban yang ada. Jika suatu kuisioner dapat menghasilkan jawaban yang konsisten meskipun dilakukan berulang kali, maka kuisioner dikatakan andal atau reliabel. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's Alpha yang dihitung melalui aplikasi SPSS. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Berdasarkan hasil proses perhitungan data, nilai Cronbach's Alpha pada setiap variabel dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Kompetensi SDM (X ₁)	0,867	Reliabel
Pengendalian Intern (X ₂)	0,923	Reliabel
Kualitas PBJ (Y)	0,852	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai Cronbach's Alpha pada 3 variabel lebih besar dari 0,70. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel.

3. Uji Normalitas

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear mengharuskan data yang digunakan terdistribusi secara normal. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode analisis grafik histogram dan model one-sample Kolmogorov-Smirnov atas variabel Unstandardized Residual.

Tabel 6
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
N	100
Test Statistic	0,051
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika nilai signifikansi residual (Asymp. Sig. (2-tailed)) lebih dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Data di atas menunjukkan nilai signifikansi residual sebesar 0,2 (> 0,05). Dengan begitu dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas data.

4. Uji Hipotesis

Setelah data dipastikan valid, reliabel dan memenuhi asumsi normalitas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda. Model ini menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sekaligus mengukur berapa besar pengaruhnya.

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Ekspektasi	Std. Coef. Beta	Sig.	Kesimpulan
Kompetensi (X ₁)	Positif	0,416	0,000	H ₁ diterima
Pengendalian Intern (X ₂)	Positif	0,313	0,002	H ₂ diterima
F hitung	36,258			
F-sig.	0,000			
Adjusted R ²	0,416			

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,52 + 0,354X_1 + 0,156X_2 + 0,05$$

- a. Variabel kompetensi memperoleh nilai beta sebesar 0,416 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan data tersebut hipotesis pertama dapat diterima. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan BKN.
- b. Variabel pengendalian intern memperoleh nilai beta sebesar 0,313 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di BKN.

Nilai F hitung sebesar 36,258 bernilai lebih besar dari F tabel (3,090). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM (X₁) dan pengendalian intern (X₂) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa (Y) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan data pada Tabel, diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R²) sebesar 0,416. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi SDM dan pengendalian intern mempengaruhi kualitas pengadaan barang dan jasa sebesar 41,6%. Sedangkan proporsi sisanya sebesar 58,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Negara

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa. Nilai koefisien regresi di angka 0,534 menunjukkan besarnya pengaruh kompetensi SDM dalam menentukan kualitas PBJ di BKN. Hal ini sejalan dengan teori manajemen SDM bahwa pengelolaan SDM dapat mempengaruhi nilai sebuah organisasi. SDM sebagai penggerak

organisasi harus mampu (kompeten) dalam menyelesaikan tugas yang diembannya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi kegiatan yang krusial tidak hanya bagi roda pemerintahan, namun juga bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap kualitas PBJ sejak masa reformasi dengan diterapkannya sistem pengadaan berbasis elektronik (E-Procurement). Pembangunan sistem apapun itu selalu menuntut kualitas SDM yang mumpuni. Teknologi dengan spesifikasi mutakhir sekalipun tidak akan berguna di tangan mereka yang tidak bisa memanfaatkannya.

Kompetensi secara luas tidak hanya mengukur kemampuan dan keterampilan, namun juga etika dan akhlak (attitude). Sistem yang maju memang mampu membatasi ruang gerak kecurangan, namun tidak akan dapat menghilangkannya. Kualitas PBJ yang bersih dan akuntabel ditentukan pula oleh akhlak para pengelolanya. Tidak ada sistem yang sempurna. Setiap sistem memiliki celah yang selalu memberi ruang bagi kebocoran. Satu-satunya yang dapat menambal celah tersebut adalah akhlak para pamangku kepentingan yang berperan di balik sistem.

Selain itu, kompetensi juga berkaitan dengan motivasi. Semakin besar motivasi yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, akan semakin baik pula hasil kerjanya. Motivasi bisa datang dari mana saja. Salah satu motivasi terbesar manusia datang dari aspek ekonomi. Hierarki Kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan pertama seorang manusia adalah pemenuhan fisiologi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Setelah manusia merasa kenyang dan nyaman di dalam rumah, kebutuhan mereka akan meningkat menjadi rasa aman (Kadji, 2012). Begitu seterusnya hingga manusia termotivasi untuk melakukan aktualisasi diri. Manusia akan menghasilkan kualitas pekerjaan paling baik ketika mereka tidak lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, namun untuk mengaktualisasikan diri mereka. Semakin tinggi insentif yang diberikan kepada seorang pegawai, akan semakin tinggi motivasi bekerja mereka.

Henry Ford adalah salah satu orang yang pertama kali membuktikan bahwa motivasi untuk bekerja sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan. Pada tahun 1914, Henry Ford melakukan kebijakan mengejutkan dengan menaikkan upah karyawannya sebesar 2 kali lipat. Selain itu, Ford membatasi jam kerja karyawan menjadi 8 jam kerja, yang pada waktu itu bukan merupakan hal lazim. Hasilnya, perusahaan Ford berhasil merekrut karyawan terbaik yang memiliki motivasi tinggi untuk produktif. Hanya selang satu tahun sejak kenaikan upah tersebut, laba bersih Ford meningkat lebih dari 20%. Jika pada waktu itu Ford hanya berfokus membangun pabrik canggih dengan assembly line-nya yang terkenal itu tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan, mungkin akan terdapat gap antara kapasitas produksi pabrik dengan produk yang dihasilkan karena tidak ada karyawan yang berkompeten untuk memanfaatkannya (Sutrisno, 2019).

Pada akhirnya, kompetensi SDM selalu signifikan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan, tanpa terkecuali dalam PBJ pemerintah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas PBJ pada Badan Kepegawaian Negara.

2. Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Negara

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Badan Kepegawaian Negara. Nilai koefisien regresi variabel pengendalian intern berada di angka 0,156. Meskipun relatif lebih kecil daripada koefisien regresi variabel kompetensi SDM, pengaruh ini masih terbilang besar. Telah menjadi teori yang diterima umum bahwa pengendalian intern dapat membantu sebuah organisasi untuk bergerak mencapai tujuannya. Pada penelitian ini, tujuan pengadaan barang dan jasa terbukti dipengaruhi oleh bagaimana sebuah organisasi menerapkan pengendalian intern.

Pencapaian tujuan organisasi sebagian besar ditentukan oleh bagaimana SDM-nya bergerak dan bagaimana sistem pengendalian intern-nya dibangun. Pengendalian intern dan SDM merupakan komponen yang saling berkaitan. Seperti sebuah pesawat yang terbang ke suatu tujuan, pengendalian intern bagaikan air traffic controller (ATC) yang memandu pilot untuk memastikan pesawat berada pada jalur yang tepat. Dalam sebuah organisasi, pengendalian intern berfungsi sebagai pengawas dan pembimbing (assurance and consulting) agar risiko dan

hambatan dapat diminimalisasi sehingga visi organisasi dapat dicapai secara efisien.

Komponen pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas monitoring. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan penegakkan nilai etika, pemisahan tanggung jawab, penyusunan struktur, dan efektivitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Komponen ini merupakan pondasi utama dalam membangun pengendalian yang efektif dalam organisasi. Sistem pengendalian intern harus dibangun di atas kondisi yang secara struktural kondusif. Dalam konteks PBJ, pejabat dan unit kerja yang berwenang harus ditentukan dengan jelas. Secara normatif, proses pelaksanaan PBJ serta pemisahan jabatan telah diatur dengan baik dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa. Menjadi tantangan besar bagi setiap instansi pemerintah untuk dapat menerapkan struktur tersebut dalam kondisi yang ideal. Hal ini menuntut komitmen pimpinan (top manager) untuk dapat memfungsikan setiap jabatan sesuai dengan tugas yang ditentukan. Selain itu, efektivitas APIP dalam mengawasi kualitas PBJ juga ditentukan oleh bagaimana struktur organisasi dibentuk dan seberapa besar komitmen pimpinan untuk mendukung APIP memaksimalkan perannya.

Komponen kedua dalam SPIP adalah identifikasi dan analisis risiko. PBJ merupakan kegiatan yang memiliki risiko besar terutama melihat sumber daya finansial yang dikerahkan dalam pelaksanaannya. Risiko besar ini tentu membutuhkan perlakuan khusus agar dapat diminimalkan sesuai batas minimum risiko yang dapat diterima. Semakin efektif mitigasi risiko, semakin baik juga kualitas PBJ. Komponen ketiga adalah kegiatan pengendalian. Selain membangun lingkungan dan menganalisis risiko, kegiatan pengendalian harus dapat dilaksanakan dengan efektif. Kegiatan pengendalian ini di antaranya audit internal, pemeriksaan fisik aset, dan audit kepatuhan terhadap peraturan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan oleh APIP maupun setiap unit kerja. Pimpinan pada setiap unit kerja bertanggung jawab langsung atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang dibawahinya. Dalam proses PBJ, kegiatan pengendalian secara langsung dilakukan oleh ULP, LPSE, serta APIP untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas pengadaan.

Komponen keempat adalah informasi dan komunikasi. Akuntabilitas informasi pengadaan, mulai dari rencana umum pengadaan (RUP), kejelasan prosedur mengikuti tender, hingga pemberian predikat daftar hitam menjadi hal penting bagi peningkatan kualitas PBJ. Selain itu, komunikasi yang baik harus dibangun baik itu intra organisasi maupun antar organisasi eksternal yang berkaitan seperti Kementerian Keuangan atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sarana komunikasi juga harus tersedia bagi masyarakat umum, penyedia, maupun pegawai untuk melaporkan adanya indikasi penyelewengan dalam proses PBJ dengan jaminan keamanan bagi pelapor. Dengan terbukanya informasi dan adanya sarana komunikasi yang efektif, kualitas PBJ akan meningkat seiring waktu.

Kelima adalah pemantauan atau monitoring penerapan pengendalian intern itu sendiri. Penerapan SPIP harus dievaluasi dan dibenahi secara berkala agar pondasi organisasi selalu kokoh. Seperti sebuah jalan, jika kondisinya tidak dipantau dan dibenahi secara berkala, mobil yang sedang melaju mencapai tujuan berisiko untuk terhambat di tengah jalan. Kegiatan evaluasi ini dapat berupa pemantauan berkelanjutan maupun kegiatan khusus yang menilai kondisi SPIP. Pengendalian intern dibangun untuk menjamin organisasi mencapai tujuannya dengan optimal. Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Badan Kepegawaian Negara

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara kompetensi SDM dan pengendalian intern terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Dari hasil pengujian data dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Badan Kepegawaian Negara. Semakin berkompeten SDM di BKN akan menghasilkan kualitas pengadaan yang semakin

baik. Peningkatan satu poin kompetensi SDM akan meningkatkan kualitas PBJ sebesar 0,534 poin. Hal ini karena SDM merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengendalian intern terbukti berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Badan Kepegawaian Negara. Peningkatan kualitas pengendalian intern akan turut meningkatkan kualitas hasil pengadaan. Setiap kenaikan kualitas pengendalian intern sebesar satu poin akan meningkatkan kualitas hasil pengadaan sebesar 0,156 poin. Hal ini sejalan dengan teori audit bahwa pengendalian intern (internal control) dapat meningkatkan kinerja dan nilai sebuah organisasi. Kompetensi SDM dan pengendalian intern secara bersama-sama menentukan kualitas PBJ di BKN sebesar 41,6%. Angka ini cukup signifikan mengingat hanya terdapat dua variabel yang diuji dalam model penelitian. Artinya, seandainya BKN mampu menghasilkan kualitas PBJ yang sempurna (nilai 100), kompetensi SDM dan pengendalian intern berkontribusi sebesar 41,6 poin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Aparatur Pemerintah Atas Prosedur Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri). Universitas Brawijaya.
- Astuti, H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi, Univer-Sitas Maritim Raja Ali Haji.
- Bachtiar, H. F., Sofilda, E., & Kusumastuti, S. Y. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, Dan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan.
- Gusnita, J., Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Pelalawan (Studi Empiris Pada Kabupaten Pelalawan). Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), 7(2).
- Kadji, Y. (2012). Tentang Teori Motivasi. Jurnal Inovasi, 9(01).
- Khusaini, M. (2019). Ekonomi Publik. Universitas Brawijaya Press.
- Kusuma, R. I. (2012). Penggunaan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Universitas Airlangga.
- Macdonald, T. T., & Spencer, J. (1993). Development Of Gastrointestinal Immune Function And Its Relationship To Intestinal Disease. Current Opinion In Gastroenterology, 9(6), 946–952.
- Narotama. (2013). Indonesia Procurement Watch: 70 Persen Kasus Korupsi Dari Pengadaan Barang/Jasa. Fh.Narotama.Ac.Id. <https://Fh.Narotama.Ac.Id/2013/07/Indonesia-Procurement-Watch-70-Persen.Html>
- Pangaribuan, L. (2018). Analisis Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Skripsi-2018.
- Ramadhani, T. A., & Sugiyanto, F. X. (2014). Dampak Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Sektor Pertanian Terhadap Output, Pendapatan Rumah Tangga Dan Kesempatan Kerja. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi Xviii.
- Sukmana, O. (2016). Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol, 2(1), 103–122.
- Sutrisno, H. E. (2019). Budaya Organisasi. Prenada Media.
- Van Weele, A. J. (2010). Purchasing And Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning And Practice. London: Cengage Learning.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)